

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENDERITA GANGGUAN
IDENTITAS DISOSIATIF
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

NUR NAAFILAH NURDIN

NIM: 10400113116

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Naafilah Nurdin
NIM : 10400113116
Tempat/Tgl.Lahir : Rappang, 21 Maret 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata, Gowa
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderita Gangguan
Identitas Disosiatif (Studi Komparatif Antara Hukum Islam
dan Hukum Nasional)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 29 Mei 2017

Penulis,



Nur Naafilah Nurdin

NIM: 10400113116

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”, yang disusun oleh Nur Naafilah Nurdin, NIM 10400113116, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Juli 2017 M, bertepatan dengan 19 Syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 13 Juli 2017 M
19 Syawal 1438 H

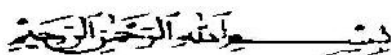
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi.	(.....)
PembimbingII	: Abdi Wijaya, S.S., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Tiada kalimat yang paling pantas penyusun panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Nurdin H., B.Sc. dan Ibunda tercinta Syamsudduha Khalik, S.Pd. yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materiilnya, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta kakak saya Syamriwal Nurdin atas semua perhatian dan kasih sayangnya.

1. Teruntuk Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
2. Teruntuk Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penulis.
4. Teruntuk Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Hi. dan Bapak Abdi Wijaya, S.S., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat serta motivasi demi kemajuan penulis.
5. Teruntuk Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. dan Bapak Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag. selaku penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, nasihat serta motivasi demi kemajuan penulis.
6. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, terkhusus Bapak Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag. selaku dosen jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan

ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.

7. Teruntuk Ibu Suhartini Khalik, S.Pd., M.Pd. selaku dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan ilmu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat terbantu dalam hal penyelesaian penulisan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terkhusus Angkatan 2013 “AR13ITER” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya di kampus, Ekasari Juwandana, Fina Febrianti, Nurmilasari dan Sry Wahyuni serta teman-teman satu bimbingan yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat lama saya sejak dibangku SMP, Hajriana Tamrin dan Ayu Setia Ningsih yang selalu ada menemani dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materiil maupun formil.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Āmīn Yā Rabbal Ālāmīn*.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Samata, 12 Mei 2017

Penulis,



NUR NAAFILAH NURDIN

NIM: 10400113116



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1-16
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF	17-37
A. Pengertian Gangguan Identitas Disosiatif	17
B. Gangguan Identitas Disosiatif dalam Islam	19
C. Ciri-ciri Penderita Gangguan Identitas Disosiatif	22
D. Penyebab Terjadinya Gangguan Identitas Disosiatif pada Seseorang ..	24
E. Hakikat Gangguan Identitas Disosiatif.....	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN	38-63
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	38
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional	39
B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan	41
1. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	41
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional	43
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan	48
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	48
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional	51
D. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	57
1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	57
2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional	59

BAB IV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENDERITA GANG- GUAN IDENTITAS DISOSIATIF, ANALISIS KOMPARATIF

ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL	64-79
A. Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif dalam Pandangan Hukum Islam	64

1. Penjelasan Umum	64
2. Penjatuhan Sanksi	68
B. Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif	
dalam Pandangan Hukum Nasional	71
1. Penjelasan Umum	71
2. Penjatuhan Sanksi	74
C. Analisis Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	77
1. Pandangan Terhadap Pembunuhan oleh Penderita Gangguan	
Identitas Disosiatif	77
2. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku	78
3. Perbandingan Hukum	78
BAB V PENUTUP	80-81
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian	81
DAFTAR PUSTAKA	82-85
RIWAYAT HIDUP	86

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A

ا	Kasrah	i	I
أ	ḍammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	fathāh dan yā	ai	a dan i
او	fathāh dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... / أ... / إ...	Fathāh dan alif atau yā	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'* marbūṭah ada dua yaitu: *tā'* marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā'* marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

المدينة الفا ضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu”ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلاية : al-zalalah (az-zalalah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al- bilādu

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta'murūna

النوع : al-nau'

شيء : syai'un

امرت : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله dīnullāh با الله billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: subḥānahū wa ta'ālā
saw.	: ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	: 'alaihi al-salām
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nur Naafilah Nurdin

NIM : 10400113116

Judul : Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dari gangguan identitas disosiatif, untuk mengetahui perspektif Islam dan nasional mengenai gangguan identitas disosiatif, serta untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan yuridis. Penelitian ini jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Sehingga untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan secara luas yang kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil dari perolehan data guna dianalisis menggunakan teori yang ada untuk penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pada hakikatnya gangguan identitas disosiatif merupakan suatu gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Sehingga untuk tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif menurut hukum Islam tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, hal itu merupakan hak otonomi sepenuhnya bagi keluarga korban untuk menentukan salah satu dari beberapa alternatif pilihan sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sementara menurut hukum pidana nasional Indonesia pelaku dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, pelaku dikenai pasal sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, dalam hal ini pelaku melakukan jenis pembunuhan sengaja dengan dasar hukum Pasal 338 KUHP dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya perhatian lebih terhadap penderita gangguan identitas disosiatif, mengingat penyebab dari gangguan ini ialah kurangnya perhatian terhadap penderita, 2) hukum pidana nasional perlu membuat aturan yang lebih spesifik mengenai gangguan kejiwaan apa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, 3) hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk memutuskan perkara yang sama dengan pokok penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia diadaptasi oleh tiga hukum yang sangat berpengaruh di Indonesia, yakni hukum Barat (*civil law*), hukum adat dan hukum Islam. Hal inilah yang membuat sistem hukum nasional di Indonesia nampak unik dan berbeda dari sistem hukum nasional di negara lain.

Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh negara Belanda harus menerapkan sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum *civil law* ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas konkordansi atau asas keselarasan (*concordantie begeinsel*) yakni asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Dasar hukum konkordansi adalah pasal 131 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS).¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum tersebut merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda kepada Indonesia. Sistem hukum Barat ini memiliki sifat individualistik. Warisan sistem hukum Barat masih dapat dijumpai sampai saat ini, yakni dalam KUHP, KUHPerdota dan KUHD.²

¹D. Aditia Warman, "Pengantar Hukum Indonesia", *Blog D. Aditia Warman*. <http://pandangandaditiawarmansh.blogspot.co.id/2013/05/pengantar-hukum-indonesia.html?m=1> (2 November 2016).

²Adityo Ariwibowo, "Sistem Hukum Nasional Indonesia (Sudah adakah Sistem Hukum Nasional Indonesia?)", *Blog Adityo Ariwibowo*. <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/06/11/sistem-hukum-nasional-indonesia-sudah-adakah-sistem-hukum-nasional-indonesia/> (2 November 2016).

Selain sebagai negara bekas jajahan, Indonesia juga merupakan negara dengan masyarakat majemuk atau mempunyai arti yang sama dengan masyarakat plural atau pluralistik. Biasanya, hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhinneka.³ Karena Indonesia terdiri dari pelbagai suku bangsa, menjadikan Indonesia kental dengan hukum adatnya. Menurut Soepomo, hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*costomary law*).⁴ Sedangkan menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan dan bersifat kekeluargaan.⁵ Sementara sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Aturan-aturan inilah yang terus berkembang dan terus-menerus dipertahankan oleh masyarakat. Sehingga beberapa hukum adat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan masyarakat dibakukan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 12.

⁴Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952), h. 30.

⁵Hardjito Notopuro, "Tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional" dalam Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan RI* (Jakarta: Cendana Press, 1984), h. 19.

Disamping itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam tidak bisa terlepas dari ajaran Islam. Ajaran Islam di Indonesia dirumuskan dalam bentuk hukum Islam dan menjadi salah satu sumber hukum nasional Indonesia. Namun rumusan dalam bentuk hukum Islam tersebut juga tidak terlepas dari sumber utama ajaran Islam yakni Alquran dan hadis.

Di dalam hukum Islam, terakomodir segala aturan tentang ibadah dan muamalah. Taharah, shalat, zakat, puasa, haji, merupakan beberapa perbuatan yang diatur dalam hal ibadah. Sedangkan dalam hal muamalah yang diatur di antaranya tentang *munakahat*, kewarisan, peradilan, ekonomi serta jinayah.

Dikalangan para *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda ataupun lainnya.⁶ Al-Jurjani juga mendefinisikan jinayah sebagai:

“Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan *ʿarar* (sesuatu yang membahayakan) baik kepada diri sendiri atau orang lain”.⁷

Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam meliputi tindak pidana *qiʿaʿ*, hudud dan *taʿzir*.

Qiʿaʿ merupakan penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Misalnya, pelaku telah menghilangkan nyawa korbannya, maka pelaku wajib dibunuh. Pelaku juga bisa dikenakan hukuman berupa membayar sejumlah *diyat*, atau juga membayar *kifarah*, atau juga bisa berupa

⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 1.

⁷Ibnu ʿAbidin, *Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ʿala Ad-Dur Al-Mukhtar)* Jilid VI (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003), h. 359.

hukuman moral. Allah. swt. telah mewajibkan ditegakkannya hukum *qi'a?*, sebagaimana diwajibkannya berpuasa bulan Ramadhan.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah. swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu *qi'a?* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.⁹

Qi'a? tidak serta merta dijatuhkan kepada pelaku. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya:

1. orang yang terbunuh dilindungi darahnya;
2. balig, hukum *qi'a?* tidak dikenakan terhadap anak kecil;
3. berakal, begitu juga bagi orang gila dan orang yang perkembangan akalnya terganggu atau idiot, karena mereka bukan orang-orang yang dibebankan oleh hukum pertanggungjawaban dan mereka juga tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas,

⁸Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat* (Cet. I; Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 67-68.

⁹Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung: Penerbit Diponerogo, 2013), h. 27.

4. pembunuh dalam kondisi bebas memilih, sebab seandainya dia dipaksa berarti hal miliknya tercabut, tanggungjawab tidak dibebankan terhadap orang yang hilang hak miliknya,
5. pembunuh bukan orang tua si terbunuh,
6. pembunuh dan terbunuh sederajat,
7. tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum *qi'a*? atasnya, dan
8. pembunuh oleh massa atau kelompok orang.¹⁰

Namun, kenyataannya tidak semua pembunuhan dilakukan oleh orang waras ataupun gila. Ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang waras namun nampak tidak waras, karena pelaku tidak mampu mengingat atau pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini pelaku mengalami hilang ingatan (amnesia), pelaku lupa akan kronologis kejadian yang telah dilakukan sehingga menyulitkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta tidak adanya pengakuan ataupun rasa bersalah atas perbuatannya sendiri. Pelaku seperti menjadi pribadi lain saat dia melakukan perbuatannya. Mulai dari ingatan, kepercayaan hingga perilaku semuanya akan nampak berbeda.¹¹ Hal semacam ini disebut dengan gangguan identitas disosiatif (*dissosiative identity disorder*).

Orang semacam ini akan sulit dijatuhkan sanksi atas perbuatannya, dikarenakan tidak adanya pengakuan, bahkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai hal ini. Sehingga dapat

¹⁰Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 121-123.

¹¹Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, terj. Brian Marwensdy, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*, Jilid II (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 326.

diketahui bagaimana tindak pidana pembunuhan oleh penderit gangguan identitas disosiatif (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah bagaimana tindak pidana pembunuhan oleh penderit gangguan identitas disosiatif (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional). Pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat gangguan identitas disosiatif?
2. Bagaimana gangguan identitas disosiatif dalam perspektif Islam dan nasional?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh penderit gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam dan hukum nasional?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan di atas, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderit Gangguan Identitas Disosiatif (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional”.

Istilah yang ingin peneliti jelaskan ialah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.¹³

Penderita adalah orang yang mengalami menderita, dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu gangguan.¹⁴

Gangguan identitas disosiatif (sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian majemuk) adalah gangguan jiwa yang berasal dari akibat sampingan dari trauma parah pada masa kanak-kanak (bahasa Inggris: *childhood* umur 3-11 tahun) dan remaja (bahasa Inggris: *adolescence* umur 12-18 tahun).¹⁵ Gangguan identitas disosiatif merupakan suatu gangguan disosiatif dimana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda atau kepribadian pengganti atau *alter*.¹⁶ Terdapat beberapa variasi dari kepribadian ganda, seperti kepribadian tuan rumah atau utama mungkin tidak sadar akan identitas lainnya, sementara kepribadian lainnya sadar akan

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 54.

¹³Kitab Salaf Indonesia, "Pembunuhan Menurut Hukum Islam", *Blog Kitab Salaf Indonesia*. https://kitabsalafindonesia.wordpress.com/2013/09/19/pembunuhan-menurut-hukum-islam/_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2432303787 (10 Oktober 2016).

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 344.

¹⁵Santrock, J. W., *Child Development* (New York: McGraw-Hill, 2007), t.h.

¹⁶*Alter* adalah suatu penyakit yang membuat penderitanya mempunyai dua kepribadian atau lebih. Lihat Ganes, "Ilmu Psikologi: *Alter Ego*", *Blog Ganes*. <http://ganes-ilmupsikologi.blogspot.com/2011/01/alter-ego.html> (4 November 2016).

kepribadian si tuan rumah, ada juga kepribadian yang berbeda benar-benar tidak sadar satu sama lain.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis.¹⁸ Pengertian hukum Islam atau hukum *syara'* menurut istilah ulama *ushul*, adalah doktrin (*khi'ab syari'*) yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).¹⁹

Menurut H. Mohammad Daud Ali bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu. Dalam kasus Indonesia hukum nasional itu mungkin juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial dahulu.²⁰

Jadi, tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif adalah tindakan atau perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja yang dilakukan oleh orang dengan gangguan identitas disosiatif di mana seseorang

¹⁷ID Medis, "Makalah Gangguan Disosiatif: Gangguan Identitas, Amnesia, Psikogenetik dan Fugue", *Situs Resmi ID Medis*. <http://www.idmedis.com/2015/11/makalah-gangguan-disosiatif-gangguan-identitas.html> (10 Oktober 2016).

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153.

²⁰Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 101.

memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda atau memiliki kepribadian pengganti atau *alter ego*²¹.

D. Kajian Pustaka

Karya Howard S. Friedman dan Miriam W. Schustack yang diterjemahkan oleh Benedictine Widyasinta dengan judul asli "*Personality: Classic Theories and Modern Research* dengan terjemahan *Kepribadian: Teori Klasik dan Riset Modern*" mengatakan bahwa "Gangguan kepribadian ambang adalah istilah yang kerap diterapkan pada orang yang memiliki masalah impulsivitas dan perilaku merusak diri (*self-destructive behavior*) yang parah, identitas-diri yang rapuh, relasi yang tidak stabil dan penuh konflik. Individu-individu yang tidak stabil ini tiba-tiba bisa mengalami perubahan *mood*, marah meledak-ledak, atau bahkan mengancam atau berusaha bunuh diri; karena merasa "hidupnya kosong" dan merasa ditinggalkan. Tidak mengherankan jika orang semacam itu kerap ditemui oleh para psikolog klinis dan pada psikiater, namun mereka sulit dipahami dan ditangani. Gangguan-gangguan semacam itu mungkin diakibatkan oleh berbagai macam resiko sehingga tidak dapat dipahami dan ditangani hanya dengan menggunakan sebuah perspektif tunggal".²² Selain itu, menurut buku ini salah satu penyebab orang mengalami gangguan kepribadian adalah ketika masa kanak-kanak pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik. Sehingga stres dan kekerasan semacam itu dapat meningkatkan resiko orang tersebut mengalami masalah mental dan kesehatan fisik di kemudian hari. Namun, tidak semua anak akan mengembangkan sindrom ini. Anak-anak yang

²¹Lihat No. 16

²²Howard S. Friedman dan Miriam W. Schustack, *Personality: Classic Theories and Modern Research*, terj. Benedictine Widyasinta, *Kepribadian: Teori Klasik dan Riset Modern* Edisi III Jilid II (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 47.

beresiko tinggi terhadap gangguan kepribadian kerap dibesarkan oleh orang tua yang memberikan pandangan yang menyimpang mengenai dunia dan mereka tidak dapat memahami orang tuanya. Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang kepribadian yang rentan terhadap penyakit, perubahan kepribadian yang disebabkan oleh penyakit dan *Diathesis-Stres*. Sedangkan penelitian ini fokus pada gangguan identitas disosiatif dalam perspektif Islam.

Karya Sumadi Suryabrata yang berjudul "*Psikologi Kepribadian*" mengatakan bahwa "Apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung ialah suatu bentuk aktifitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan empat fungsi pokok, yang dua rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedang yang dua lagi irrasional, yaitu pendriaan dan intuisi. Dalam berfungsinya fungsi-fungsi rasional bekerja dengan penilaian: pikiran menilai atas dasar benar dan salah, sedang perasaan menilai atas dasar menyenangkan dan tak menyenangkan. Kedua fungsi yang irrasional tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata mendapat pengamatan: pendriaan mendapatkan pengamatan dengan sadar-indriah, sedang intuisi mendapatkan pengamatan secara tak-sadar-naluriyah".²³ Selain itu, menurut buku ini bahwa jiwa manusia terdiri dari dua yaitu alam sadar (kesadaran) dan alam tidak sadar (ketidaksadaran). Kedua alam itu tidak hanya saling mengisi, namun juga berhubungan secara kompensatoris. Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang struktur *psyche* atau kepribadian, dinamika *psyche* atau kepribadian dan perkembangan *psyche* atau kepribadian. Sedangkan penelitian ini fokus pada gangguan identitas disosiatif menurut hukum nasional.

²³Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Cet. X; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 158-159.

Karya ilmiah yang membahas tentang pelaku kejahatan yang menderita gangguan identitas disosiatif adalah jurnal skripsi yang ditulis oleh Vinni Maranatha Manurung dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan yang Menderita Dissosiative Identity Disorder (DID)*”. Dalam pembahasan tersebut yang menjadi masalah pokok adalah apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID) dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan penelitian ini fokus pada masalah pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Karya Hamzah Hasan yang berjudul “*Hukum Pidana Islam I*” mengatakan bahwa “Para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan kepada tiga kategori, dan inilah pendapat yang paling mashur di kalangan ulama:

1. pembunuhan sengaja (*qath al-‘amd*),
2. pembunuhan semi sengaja (*qath syibh ‘amdi*) dan
3. pembunuhan tidak sengaja (*qath al-khatha*).²⁴

Dalam buku ini membahas tentang tindak pidana (jarimah) *qi’a?* diantaranya adalah pengertian tindak pidana *qi’a?*, macam-macam tindak pidana *qi’a?*, syarat-syarat *qi’a?*, cara pembuktian tindak pidana *qi’a?*, serta hapusnya tindak pidana *qi’a?*. Sedangkan penelitian ini fokus pada sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif menurut hukum Islam dan hukum nasional.

Karya Ahmad Sarwat yang berjudul “*Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat*” mengatakan bahwa “Pembunuhan yang disengaja adalah kejahatan besar dan salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman dunia dan akhirat, yaitu *qi’a?* dan

²⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 109.

keabadian di neraka. Karena pembunuhan itu pada hakikatnya adalah permusuhan terhadap penciptaan Allah. swt. di atas bumi dan ancaman atas keamanan dan kehidupan masyarakat”.²⁵ Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang hukum pembunuhan yang mencakup tentang pengertian, jenis-jenis pembunuhan serta sanksi yang dikenakan menurut syariat Islam. Selain itu, menurut buku ini pada dasarnya, hukum membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa manusia adalah haram, namun adakalanya menjadi sebaliknya, yaitu wajib. Semua tergantung pada keadaan, sebab dan tujuannya. Sedangkan penelitian ini fokus pada sanksi terhadap pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif menurut hukum Islam dan hukum nasional.

Dari semua penelitian di atas, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada satupun peneliti yang membahas secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif ditinjau dari hukum Islam. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode yang digunakan itu merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.²⁶

Adapun dalam skripsi nanti peneliti menggunakan metode:

²⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat*, h. 149.

²⁶Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam. Sedangkan berdasarkan tempatnya, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁷

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Alquran, hadis, kitab dan peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Pendekatan Teologi Normatif (*Syari'i*) adalah pendekatan hukum (*syari'i*), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan identitas disosiatif dalam Islam.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah (hukum perundangan) yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, maksudnya bila

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.9.

ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul, maka dijadikan kajian untuk diuraikan.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur yang bersifat sekunder yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi yakni dengan cara :

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan permasalahan

²⁸Maman, *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Edisi I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 127.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 254.

yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.³⁰

Adapun metode pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

- a. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.³¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak peneliti capai yaitu:

- a. Untuk mengetahui hakikat gangguan identitas disosiatif.
- b. Untuk mengetahui perspektif Islam dan nasional mengenai gangguan identitas disosiatif.
- c. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam dan hukum nasional.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai dua kegunaan:

- a. Kegunaan ilmiah, peneliti berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbagan ilmu pengetahuan mengenai hakikat gangguan identitas disosiatif, perspektif Islam dan nasional mengenai gangguan tersebut serta bagaimana

³⁰Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: PenerbitUI 1992), h. 45.

³¹Abd. Kadir Ahmad, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data” (Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, Makassar), h. 8.

penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan tersebut menurut hukum Islam dan hukum nasional.

- b. Kegunaan praktis, peneliti berharap penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum dan bagi penderita gangguan identitas disosiatif pada khususnya, serta bagi bangsa, negara dan agama.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF

A. *Pengertian Gangguan Identitas Disosiatif*

Secara etimologi, kata “gangguan” yang menurut kamus bahasa Indonesia berarti hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan (tentang jiwa, kesehatan, pikiran).¹ Sementara kata “identitas” menurut kamus bahasa Indonesia berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda; jati diri.² Sedangkan kata “disosiatif” berasal dari bahasa Inggris “*dissociate*” yang termasuk ke dalam jenis kata kerja yang berarti memisahkan, menjauhkan.

Menurut David A. Tomb, bahwa dulu gangguan identitas disosiatif dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, pasien-pasien dengan gangguan dramatik ini percaya bahwa mereka mempunyai paling sedikit dua (dan kadang lebih) kepribadian di dalam dirinya.³ Kepribadian adalah suatu gaya perilaku yang menetap dan secara khas dapat dikenali pada setiap individu. Gangguan kepribadian merupakan suatu ciri kepribadian yang menetap, kronis, dapat terjadi pada hampir semua keadaan, menyimpang secara jelas dari norma-norma budaya dan maladaptif serta menyebabkan fungsi kehidupan yang buruk.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 434.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 538.

³David A. Tomb, *House Officer Series Psychiatry*, terj. Martina Wiwie S. Nasrun, dkk., *Buku Saku Psikiatri*, Edisi VI (Cet. I; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 113.

⁴David A. Tomb, *House Officer Series Psychiatry*, terj. Martina Wiwie S. Nasrun, dkk., *Buku Saku Psikiatri*, Edisi VI, h. 232.

Sedangkan disosiasi adalah terpecahnya aktifitas mental yang spesifik dari sisa kesadaran normal, seperti terpecahnya pikiran atau perasaan dari perilaku, misal, ketika kita bosan mengikuti kuliah, kita melamun dan ketika kuliah usai ternyata catatan kuliah tetap lengkap tanpa menyadari bahwa kita melakukan hal itu. Gangguan disosiatif menunjukkan disosiasi yang berat mengakibatkan timbulnya gejala-gejala yang berbeda dan bermakna dan mengganggu fungsi seseorang.⁵

Sementara menurut Laura A. King, bahwa gangguan identitas disosiatif atau *dissociative identity disorder* (DID) atau yang sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda (*multiple personality disorder*) adalah gangguan yang paling dramatis, namun paling jarang ditemukan dibanding dengan gangguan disosiasi lainnya. Individu yang menderita gangguan ini memiliki dua atau lebih kepribadian atau *selves*. Setiap kepribadian memiliki ingatannya masing-masing dan hubungan. Satu kepribadian mendominasi pada satu waktu, sementara kepribadian lain mengambil alih pada waktu lain, dan kepribadian ini dipisahkan oleh dinding amnesia. Perubahan kepribadian biasanya terjadi dalam situasi *distress*.⁶

Selain itu menurut Sarlito W. Sarwono, *dissociative identity disorder* (DID) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Split Personality* atau *Multiple Personality* (kepribadian ganda), dulu dianggap sebagai salah satu jenis skizofrenia karena mengandung suatu gejala dari gangguan mental itu, yaitu pola pikir yang kacau. Pemisahan DID dari skizofrenia dipicu oleh temuan psikoterapis dr. Cornelia B. Wilbur atas diri pasiennya bernama Shirley Ardell Mason. Dalam buku tentang

⁵David A. Tomb, *House Officer Series Psychiatry*, terj. Martina Wiwie S. Nasrun, dkk., *Buku Saku Psikiatri*, Edisi VI, h. 111.

⁶Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, terj. Brian Marwensdy, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*, Jilid II (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 326.

pasien ini, yang ditulis oleh Flora Rheta Schreiber, Mason diberi nama samara Sybil Dorset. Laporan yang kemudian dibukukan itu diberi judul “Sybil” (1973).⁷

Jadi, gangguan identitas disosiatif adalah sekelompok gangguan yang ditandai oleh suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Gangguan identitas disosiatif merupakan suatu mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang membantu seseorang melindungi aspek emosional dirinya dari mengenali dampak utuh beberapa peristiwa traumatik atau peristiwa yang menakutkan dengan membiarkan pikirannya melupakan atau menjauhkan dirinya dari situasi atau memori yang menyakitkan.⁸

B. Gangguan Identitas Disosiatif dalam Islam

Gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda atau *Dissociative Identity Disorder* (DID) merupakan gangguan mental di mana seseorang yang mengidapnya akan memiliki dua kepribadian yang berbeda bahkan ada kalanya dua pribadi itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Para ahli psikologi menganggap itu sebagai gangguan mental yang muncul sebagai akibat trauma pada masa kanak-kanak. Orang yang mengalami gangguan ini kadang kala tidak tahu jika dirinya memiliki kepribadian ganda.⁹

⁷Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 260-261.

⁸ID Medis, “Makalah Gangguan Disosiatif: Gangguan Identitas, Amnesia, Psikogenetik dan Fugue”, *Situs Resmi ID Medis*. <http://www.idmedis.com/2015/11/makalah-gangguan-disosiatif-gangguan-identitas.html> (14 November 2016)

⁹Fadhilza, “Kepribadian Ganda Penyakit Akibat Gangguan Jin”, *Blog Fadhilza*. <http://www.fadhilza.com/2015/08/dunia-metafisika/kepribadian-ganda-penyakit-akibat-gangguan-jin.html> (22 April 2017).

Berdasarkan perspektif psikologi Islam, kepribadian ganda merupakan serangkaian perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah asli yang murni, bersih dan suci, yang telah ditetapkan oleh Allah. swt. sejak zaman azali. Gangguan tersebut dapat menyebabkan rusaknya jiwa sehingga jiwa menjadi kosong, hati akan mati, walaupun secara fisik terlihat gagah dan sehat. Individu yang mengalaminya akan mengalami kekosongan kalbu, gelisah, gersang dan tidak dapat menikmati kehidupannya.

Dalam konsep Islam istilah gangguan kepribadian ini sering diidentikkan dengan akhlak tercela, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Gangguan kepribadian yang mengarah kepada perilaku buruk atau akhlak tercela yang sering dikenal dengan istilah psikopatologi.

Psikopatologi atau sakit mental adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Istilah psikopatologi ini mengacu pada sebuah sindrom yang luas, yang meliputi ketidaknormalan kondisi indra, kognisi dan emosi.

Psikopatologi dalam Islam dapat dibagi dalam dua kategori; pertama, bersifat duniawi. Macam-macam psikopatologi dalam kategori ini berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang telah dirumuskan dalam wacana psikologi kontemporer; kedua, bersifat ukhrawi, berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual dan agama.¹⁰ Namun dalam hal ini, peneliti

¹⁰Pembagian psikopatologi ini mengacu pada pembagian psikoterapi yang dirumuskan oleh Muhammad Mahmud Mahmud, *‘Ilm al-Nafs al-Ma’āshir fī Ḍaw’i al-Islām* (Jeddah: Dār al-Syurūq, 1984), h. 402.

hanya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kategori yang berhubungan dengan pokok penelitian ini yakni kategori pertama yang bersifat duniawi.

Model psikopatologi yang pertama memiliki banyak kategori. Hal itu disebabkan oleh perspektif masing-masing psikolog yang berbeda-beda. Pertama, dari perspektif biologi, idenya adalah bahwa gangguan fisik menyebabkan gangguan mental seseorang. Kedua, dari perspektif *psikoanalitik*, idenya adalah bahwa gangguan mental disebabkan oleh konflik bawah sadar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak awal dan pemakaian mekanisme pertahanan untuk mengatasi kecemasan yang ditimbulkan oleh impuls dan emosi yang depresi. Ketiga, dari perspektif perilaku, yang memandang gangguan mental dari titik pandang teori belajar dan berpendapat bahwa perilaku abnormal adalah cara yang dipelajari untuk melawan stres. Keempat, dari perspektif kognitif, idenya adalah bahwa gangguan mental berakar dari gangguan proses kognitif dan dapat dihilangkan dengan mengubah kondisi yang salah tersebut.¹¹

Akhlak tercela dianggap sebagai psikopatologi, sebab hal itu mengakibatkan dosa (*al-itsm*), baik dosa vertikal maupun dosa horizontal atau sosial. Dosa adalah kondisi emosi seseorang yang dirasa tidak tenang setelah ia melakukan suatu perbuatan (baik perbuatan lahiriah maupun batiniah) dan merasa tidak enak jika perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Padahal dosa biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebab jika diketahui oleh orang lain maka dapat menurunkan harga dirinya. Karena itu tidak mengherankan apabila pelaku dosa hidupnya selalu sedih, resah, bimbang, gelisah dan dihantui oleh perbuatan dosanya. Emosi negatif ini

¹¹Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Edisi I, h. 168-169.

apabila terus-menerus dialami oleh individu maka acap kali mendatangkan psikopatologi.

Baik dalam Alquran maupun Sunnah, jenis-jenis psikopatologi Islami banyak sekali. Meskipun tidak terhingga banyaknya, namun setidaknya-tidaknya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) psikopatologi yang berhubungan dengan akidah atau hubungan dengan Tuhan (*ilahiyah*), seperti syirik, kufur, *zindiq* dan sebagainya; (2) psikopatologi yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan (*insaniyah*), seperti *hasud*, *ujub*, *ghadab*, *su' al-zhan* dan sebagainya; (3) psikopatologi yang berkaitan dengan akidah dan hubungan manusia, seperti *riya'*, nifak dan sebagainya. Berbagai bentuk psikopatologi Islam tersebut seringkali dilupakan oleh para psikiater atau ahli jiwa kontemporer, padahal disadari atau tidak dan diakui atau tidak, bentuk-bentuk psikopatologis di atas dapat menghambat aktualisasi dan realisasi diri seseorang, bahkan acap kali mendatangkan penyakit fisik.¹²

C. Ciri-ciri Penderita Gangguan Identitas Disosiatif

Berdasarkan penjelasan dalam sub pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui ciri-ciri dari penderita gangguan identitas disosiatif ialah sebagai berikut:

1. Memiliki dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda

Kepribadian-kepribadian itu mempersepsi, menilai dan bereaksi terhadap lingkungan dengan cara yang sangat berbeda.¹³ Kepribadian yang berbeda-beda itu seperti pada pola pikir, tindakan dan gaya bicara. Penderita gangguan identitas disosiatif ini menampilkan dua atau lebih kepribadian pada situasi yang berbeda.

¹²Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Edisi I, h. 177-179.

¹³Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 261.

Misalnya ada laki-laki berusia 30 tahun dengan kepribadian asli yang lemah, tidak mampu mengambil keputusan, rapuh dan sensitif. Tapi dia juga memiliki kepribadian berbeda yaitu berani, cepat tanggap, tidak kenal kompromi dan sebagainya. Kepribadian kedua atau kepribadian pengganti (*alter*) tersebut akan muncul beberapa kali.¹⁴ Dalam hal ini ketika seseorang menemui orang dengan gangguan identitas disosiatif akan seperti menghadapi orang yang berbeda atau kepribadian yang berbeda namun masih dalam satu tubuh.

2. Dua atau lebih kepribadian tersebut mengambil alih perilaku penderita secara bergantian (*switching*)

Dua atau lebih kepribadian ini secara berulang mengambil kontrol penuh atas perilaku individu. Kepribadian tuan rumah akan ditinggalkan. Sehingga perilaku individu itu sepenuhnya berada di dalam kendali kepribadian pengganti (*alter*). Salah satu di antara beberapa kepribadian tersebut biasanya lebih menonjol, atau dominasi tersebut dapat terjadi secara bergantian. Perilaku penderita pada suatu saat akan konsisten dengan kepribadian yang sedang mendominasi pada saat itu. Setiap kepribadian dapat menyadari atau pun tidak, adanya jenis kepribadian yang lain.¹⁵

3. Mengalami amnesia dalam artian tidak mengingat apa yang telah dilakukan

Menurut Sarlito W. Sarwono, bahwa ketika satu kepribadian sedang memegang kendali, kepribadian-kepribadian lain tidak tahu-menahu. Dengan

¹⁴Kompasiana, "Kepribadian Ganda: Satu Orang, Tapi Kok Beda, Ya?", *Situs Resmi Kompasiana*. <http://m.kompasiana.com/naftalia/kepribadian-ganda-satu-orang-tapi-kok-beda-ya> (20 April 2017).

¹⁵David A. Tomb, *House Officer Series Psychiatry*, terj. Martina Wiwie S. Nasrun, dkk., *Buku Saku Psikiatri*, Edisi VI, h. 113.

demikian, terjadi gejala yang khas pada penderita gangguan identitas disosiatif, yaitu tidak ingat apa yang sudah dilakukannya.¹⁶ Penderita mudah lupa akan informasi pribadi penting yang terlalu substansial untuk dianggap sebagai lupa biasa. Seperti lupa akan masa kecilnya, lupa dengan apa yang baru saja dia lakukan dan lain sebagainya.

4. Gangguan bukan disebabkan oleh efek psikologis langsung dari suatu zat

Menurut Sarlito W. Sarwono, bahwa hal ini bukan disebabkan oleh pengaruh obat-obatan, trauma (benturan) di kepala, usia tua atau penyebab medis yang lain, melainkan karena ada pergantian kendali dalam jiwa penderita.¹⁷ Dalam artian, gangguan tersebut timbul bukan akibat dari obat yang dikonsumsi atau pun pengaruh alkohol atau pun pengaruh lain yang serupa.

D. Penyebab Terjadinya Gangguan Identitas Disosiatif pada Seseorang

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan identitas disosiatif pada seseorang, yaitu:

1. Trauma parah pada masa kanak-kanak yang terjadi secara berulang

Menurut teori Psiko-analisa oleh Sigmund Freud, trauma pada masa kanak-kanak adalah kejadian paling berulang yang mengakibatkan gangguan pada seseorang. Pada masa kanak-kanak itulah kepribadian mulai berkembang dan terbentuk. Saat terjadi pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman tersebut sebisa mungkin akan ditekan ke dalam alam bawah sadar. Namun ada beberapa kejadian

¹⁶Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 261.

¹⁷Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 261.

yang benar-benar tidak bisa ditangani oleh penderita, sehingga memaksanya untuk menciptakan sosok pribadi lainnya yang mampu menghadapi situasi itu. Hal ini merupakan mekanisme pertahanan diri, suatu sistem yang terbentuk saat seseorang tidak bisa menghadapi sebuah kecemasan yang luar biasa.¹⁸

Trauma tersebut terbentuk akibat beragam penyiksaan dan pelecehan, seperti: penyiksaan dan pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis dan juga ritual-ritual aneh yang menyakiti sang korban (*Satanic Ritual Abuse*). Laura A. King mengatakan dalam bukunya bahwa kebanyakan dari individu yang mengalami siksaan seksual tidak mengembangkan gangguan identitas disosiatif. Ibu dari individu-individu yang mengembangkan gangguan ini cenderung menolak dan memiliki depresi; ayah biasanya sosok yang jauh dari keluarga, alkoholik dan menyiksa. Kebanyakan individu dengan gangguan identitas disosiatif adalah wanita. Ketika pria mengembangkan gangguan ini, mereka menunjukkan lebih banyak agresi daripada wanita dengan gangguan ini.¹⁹

2. Kurangnya orang yang melindungi ataupun menghibur dari pengalaman buruk yang dialami

Karena kurangnya orang yang melindungi individu dari pengalaman buruk sehingga memaksa otak individu untuk membentuk suatu kepribadian baru sebagai mekanisme pertahanan diri. Kepribadian pengganti (*alter*) ini digunakan sebagai pelindung bagi kepribadian tuan rumah (asli) yang rata-rata lemah dan tidak berdaya karena seringnya mengalami pengalaman buruk. Karakter dari kepribadian pengganti

¹⁸“Gangguan Identitas Disosiatif”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_identitas_disosiatif (20 April 2017)

¹⁹Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, terj. Brian Marwensdy, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiasi*, Jilid II, h. 326.

akan cenderung bertolak belakang dengan karakter dari kepribadian tuan rumah. Misalnya kepribadian tuan rumah memiliki karakter pendiam, penakut, lemah dan lain sebagainya. Maka kepribadian pengganti lahir dengan karakter yang pemberani, kuat, cerewet dan lain sebagainya.

Pembentukan kepribadian pengganti (*alter*) yang bertolak belakang inilah yang dimanfaatkan oleh kepribadian tuan rumah (asli) sebagai “tempat” berlindung dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Kepribadian tuan rumah menjadikan kepribadian penggantinya sebagai penolong dan pelindungnya, dikarenakan kurang atau bahkan tidak adanya keluarga mau pun orang lain yang mau mengayominya.

3. Pengaruh dari anggota keluarga lain yang memiliki gangguan psikologis

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kebanyakan dari individu yang mengalami siksaan seksual tidak mengembangkan gangguan identitas disosiatif. Sebagai contoh, Sybil (Shirley Mason) lahir tahun 1923 di Minnesota dan wafat pada 1998 di Kentucky, AS. Dia mempunyai ibu yang diduga penderita skizofrenia dan ayah yang acuh tak acuh. Ibunya memperlakukan Sybil dengan sadis sejak Sybil masih berumur kurang dari dua tahun. Agar tidak menderita karena disakiti oleh ibunya dan tetap bisa mencintai orang tuanya, tetapi sekaligus juga tetap merasa sakit dan marah kepada ayah-ibunya, kepribadian Sybil terbelah menjadi dua, tiga dan seterusnya sehingga akhirnya dr. Wilbur menemukan ada 16 kepribadian dalam diri Sybil.²⁰

²⁰Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 260-261.

E. Hakikat Gangguan Identitas Disosiatif

Dissociative Identity Disorder (DID) atau Gangguan Identitas Disosiatif atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah kepribadian ganda merupakan gangguan disosiatif yang paling dramatis namun paling jarang ditemukan. Seperti yang telah peneliti paparkan pada pembahasan sebelum-sebelumnya bahwa orang dengan gangguan seperti ini memiliki dua atau lebih kepribadian di dalam dirinya. Hal ini dikarenakan individu mengalami disosiasi yakni terpecahnya aktifitas mental seperti terpecahnya pikiran, ingatan, perasaan, gaya bahasa serta perilaku. Sehingga ada pula beberapa psikolog yang berpendapat bahwa gangguan identitas disosiatif adalah pemecahan kepribadian dalam tubuh manusia.

Pada dasarnya, gangguan identitas disosiatif merupakan suatu gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Di mana gangguan ini muncul disebabkan oleh trauma parah pada masa kanak-kanak yang terjadi secara berulang. Sebagian besar psikolog berpendapat bahwa hal ini merupakan penyebab utama seseorang memiliki gangguan identitas disosiatif. Sebuah ringkasan penelitian tentang gangguan identitas disosiatif menunjukkan bahwa gangguan ini ditandai oleh tingkat kekerasan atau penyiksaan seksual dan fisik yang terus meningkat selama masa kanak-kanak awal (Poythress, Skeem, & Lilienfeld, 2006; Sar, Akyuz, & Dogan, 2007). Penyiksaan seksual terjadi pada 70% atau lebih kasus gangguan identitas disosiatif.²¹

Di samping itu, karena individu dengan gangguan identitas disosiatif ini merupakan individu yang hidup dengan dua tahu lebih kepribadian, maka otomatis

²¹Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, terj. Brian Marwensdy, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiasi*, Jilid II, h. 326.

setiap kepribadian akan muncul dan mengambil kontrol terhadap tubuh individu secara bergantian atau *switching*. Penggantian kepribadian terjadi jika individu mengalami tekanan emosional yang tinggi atau berada dalam keadaan stres atau juga individu menghadapi masalah yang dianggapnya berat dan tidak bisa ditangani sendiri. Ketika penggantian terjadi dari kepribadian tuan rumah (asli) menjadi kepribadian pengganti (*alter*) kemudian kembali lagi menjadi kepribadian tuan rumah, maka kepribadian tuan rumah tidak akan mengingat akan kegiatan apa yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan setiap kepribadian memiliki ingatannya masing-masing. Selain itu, kepribadian tuan rumah atau individu sendiri tidak mengetahui atau pun tidak menyadari akan adanya kepribadian lain atau kepribadian pengganti di dalam dirinya. Namun, kepribadian pengganti tahu dan sadar akan adanya kepribadian tuan rumah. Penjelasan ini senada dengan pendapat Sarlito W. Sarwono dalam bukunya, bahwa ketika satu kepribadian sedang memegang kendali, kepribadian-kepribadian lain tidak tahu-menahu. Dengan demikian, terjadi gejala yang khas pada penderita gangguan identitas disosiatif, yaitu tidak ingat apa yang sudah dilakukannya.²²

Sebagai contoh, berikut ini beberapa orang baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang memiliki gangguan identitas disosiatif, yakni:

1. Christine Costner Sizemore

Lahir di Edgefield, South Carolina, U.S. pada tanggal 4 April 1927 dan meninggal tanggal 24 Juli 2016 pada umur 89 tahun di Ocala, Florida, U.S. Cristine atau yang akrab disapa Chris pada tahun 1950-an didiagnosis mengidap gangguan

²²Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 261.

identitas disosiatif. Gangguan ini timbul ketika Chris yang waktu itu masih kanak-kanak pernah menyaksikan dua kematian dan sebuah kecelakaan dalam kurun waktu tiga bulan. Akibat pengalaman buruk tersebut, terciptalah 2 kepribadian baru dalam diri Chris.

Pada tahun 1957, kisah Chris dibukukan oleh dua orang psikiater dan memberi Chris nama samaran Eve, dengan judul buku "*The Three Faces of Eve*". Dalam buku tersebut diterangkan bahwa Eve alias Chris memiliki dua kepribadian pengganti yang bernama Eve *White* dan Eve *Black*. Kedua kepribadian tersebut memiliki karakter yang sangat bertolak belakang. Eve *Black* merupakan karakter wanita yang bebas, menarik dan menggoda, yang benar-benar merupakan kebalikan dari karakter Eve *White*. Sementara kemunculan kepribadian Cris yang ketiga terjadi pada saat Chris melakukan konsultasi ke psikiater. Kepribadian ketiga ini bernama Jane yang sifatnya merupakan gabungan sifat-sifat baik kedua Eve dan mengeliminasi sifat-sifat buruk keduanya, namun emosi Jane lebih stabil dibandingkan kedua Eve.²³

2. Shirley Ardell Mason

Lahir di Dodge Center, Minnesota, U.S. pada tanggal 25 Januari 1923 dan meninggal tanggal 26 Februari 1998 pada umur 75 tahun karena kanker payudara. Sekitar awal tahun 1950-an, Shirley didiagnosis oleh seorang psikoterapis bernama dr. Cornelia B. Wilbur mengidap gangguan identitas disosiatif. Gangguan tersebut timbul akibat beberapa perlakuan kejam terhadap dirinya yang sering dilakukan oleh ibunya ketika Shirley masih berumur kurang dari 2 tahun. Agar tidak menderita

²³Bzee's Inner Space, "The Three Faces of Eve", *Blog Bzee's Inner Space*. <https://bzee12space.wordpress.com/2011/09/08/the-three-faces-of-eve/amp/#amph=1> (28 April 2017).

karena disakiti oleh ibunya dan tetap bisa mencintai orang tuanya, tetapi sekaligus juga tetap merasa sakit dan marah kepada ayah-ibunya, kepribadian Shirley terbelah menjadi dua, tiga dan seterusnya.

Pada tahun 1973, kisah Shirley dibukukan oleh Flora Rheta Schreiber dan Shirley diberi nama samaran Sybil Dorsett, dengan judul buku “Sybil”. Selain itu, dokter yang menangani Sybil, dr. Wilbur menemukan ada 16 kepribadian, yaitu:

- a. Sybil Isabel Dorsett (lahir: 1923): kepribadian inti, lelah, jenuh.
- b. Victoria Antoinette Scharleau (1926): dipanggil Vicky; yakin pada diri sendiri, canggih, cantik, pirang, merupakan jejak memori dari kepribadian-kepribadian Sybil.
- c. Peggy Lou Baldwin (1926): asertif (mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan dengan cara yang pantas), penuh semangat, sering marah pada hidungnya yang buruk, rambut potongan Belanda dan punya senyum yang nakal.
- d. Peggy Ann Baldwin (1926): teman Peggy Lou, dengan ciri-ciri tubuh yang serupa dengan Peggy, tetapi lebih sering takut daripada marah.
- e. Mary Lucinda Saunders Dorsett (1933): penuh pertimbangan, berhati-hati, keibuan, sayang pada keluarga, agak tambun, berambut cokelat panjang, terbelah di samping.
- f. Marcia Lynn Dorsett (1927): terkadang nama keluarganya adalah Baldwin, pengarang dan pelukis, amat sangat emosional; wajah lonjong, mata kelabu, rambut cokelat terbelah di tengah.
- g. Vanessa Gail Dorsett (1935): sangat dramatis dan sangat menarik; tinggi semampai, berambut merah, berwajah oval yang sangat ekspresif.

- h. Mike Dorsett (1928): kepribadian Sybil yang laki-laki, tukang bangunan dan tukang cat, warna kulit gelap, warna rambut juga gelap, mata cokelat.
- i. Sid Dorsett (1928): sosok laki-laki kedua dalam kepribadian Sybil. Tukang cat dan tukang reparasi. Warna kulit biasa, rambut hitam dan mata biru.
- j. Nancy Lou Ann Baldwin (tanggal lahir tidak diketahui): berminat pada politik, religius dan sangat takut (fobia) pada agama Katolik Roma (orang tua Sybil penganut fanatik agama Kristen Advent); ciri-ciri tubuhnya mirip Peggy.
- k. Sybil Ann Dorsett (1928): tidak bersemangat, pucat, pemalu, wajah oval, hidung mancung.
- l. Ruthie Dorsett (tanggal lahir tidak diketahui): masih bayi, salah satu kepribadian yang tidak berkembang.
- m. Clara Dorsett (tanggal lahir tidak diketahui): sangat religius, sangat kritis pada kepribadian Sybil yang hendak bangkit kembali.
- n. Helen Dorsett (1929): sangat penakut, tetapi yakin bisa berprestasi, rambut cokelat muda, mata indah, hidung mancung dan bibir tipis.
- o. Marjorie Dorsett (1928): periang, mudah tertawa; bertubuh mungil, rambut brunet, kulit normal, hidung besar.
- p. *The Blonde* (si Pirang: 1946): tidak bernama; selalu sebagai remaja, rambut keriting pirang, suara nyaring, merupakan wujud dari persatuan semua kepribadian Sybil dan muncul pada akhir terapi, di mana dr. Wilbur berhasil

memperkenalkan semua kepribadian Sybil satu sama lain. Si Pirang ini menyimpan semua memori dari semua kepribadian Sybil.²⁴

3. William Stanley Milligan

Lahir di Miami, Florida, U.S. pada tanggal 13 Februari 1955 dan meninggal akibat kanker di Columbus, Ohio, U.S. tanggal 12 Desember 2014 pada usia 59 tahun. William Stanley Milligan lebih dikenal dengan nama Billy Milligan.

Pada akhir tahun 1970-an, Billy ditangkap polisi karena beberapa kasus perampokan dan pemerkosaan di Ohio State University. Ternyata, para pengacaranya melihat tanda-tanda *Dissociative Identity Disorder* (DID) atau gangguan identitas disosiatif. Gangguan ini timbul sebagai akibat dari pelecehan seksual dan kekerasan oleh ayah tirinya yang dialami ketika Billy masih kanak-kanak. Setelah meminta visum dokter, Billy dirawat di RS Jiwa milik pemerintah Athenus Lunatic Asylum. Di RS itu ia didiagnosis DID dengan 24 kepribadian dan dirawat lebih lanjut. Tetapi, perawatan di sana sama sekali tidak menolong dalam penyembuhan Billy.

Baru setelah dirawat oleh dr. David Caul, semua kepribadian dalam diri Billy, dengan sukarela bersedia untuk dipersatukan, tetapi dr. Caul mendapat kesulitan karena masyarakat dan media massa setempat tidak senang dengan metode perawatannya yang memberi kebebasan kepada pasien untuk bergaul dengan masyarakat. Masyarakat yang masih trauma karena perbuatan kepribadian-kepribadian Billy, merasa keberatan dan sering mendiskreditkan Billy sehingga 24 kepribadian dalam tubuh Billy saling bertengkar sendiri dan Billy harus menjalani terapi selama 10 tahun sebelum ia bisa berfungsi sebagai manusia normal.

²⁴Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 261-263.

Tidak lama berselang, setelah Billy selesai dengan terapinya ia pun pindah ke California. Di sana Billy memiliki sebuah *production house*, membuat film tentang dirinya sendiri dan menerbitkan buku yang menceritakan autobiografinya yang berjudul “*The Minds of Billy Milligan*” karya Daniel Keyes, tetapi ia tetap berkepribadian ganda (tanpa mengganggu masyarakat lagi).²⁵ Berikut ini kepribadian-kepribadian yang Billy miliki:

- a. Sepuluh kepribadian inti Billy Milligan atau kepribadian-kepribadian yang diinginkan:
 1. Billy Milligan (William Stanley Milligan): kepribadian inti.
 2. Arthur: seorang Inggris yang sangat canggih dan berpendidikan, ahli sains dan kedokteran, konservatif dan fasih menulis dan berbahasa Arab.
 3. Ragen Vadascovinich (Penjaga Kebencian): berbahasa Serbo-Kroasia, ahli senjata dan peluru, seorang karateka, dan mengakui telah melakukan perampokan namun ia tidak mengetahui tentang kasus pemerkosaan, mampu mengendalikan hormon adrenalin dalam tubuh, seorang komunis dan ateis, melindungi anak-anak dan wanita, seorang yang buta warna.
 4. Allen: seorang penipu dan manipulator, pemain drum, perokok dan satu-satunya kepribadian yang tidak kidal.
 5. Tommy: seniman pelarian, pemain saksofon tenor, ahli elektronik, seorang pelukis spesialis lanskap.
 6. Danny: takut pada orang khususnya laki-laki, rambut pirang sebah, mata biru, perawakan pendek langsing.

²⁵Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi I, h. 264.

7. David (Penjaga Rasa Sakit): usia 8 tahun, penuh intuisi, sering kebingungan, rambut cokelat tua kemerahan, tubuh agak kecil.
8. Christene: usia 3 tahun, disleksia tapi Arthur mengajarnya membaca dan menulis, memiliki ikatan khusus dengan Ragen.
9. Christopher (saudara Christene): pemain harmonika, berbicara dengan aksen Inggris, penurut, rambut cokelat agak pirang seperti Christene tapi dengan poni yang agak pendek.
10. Adalana: seorang lesbian, memasak dan membersihkan rumah untuk yang lain, penulis puisi, dan mengakui telah melakukan pemerkosaan tanpa sepengetahuan Billy atau yang lainnya.
- b. Kepribadian-kepribadian yang tidak diinginkan:
 11. Phill: seorang preman, memiliki aksen Brooklyn, rambut cokelat keriting, mata cokelat terang dan berhidung bengkok.
 12. Kevin: seorang kriminal, merupakan perencana pidana, senang menulis, berambut pirang dan bermata hijau.
 13. Walter: orang Australia, seorang pemburu binatang, pandai menentukan arah.
 14. April: berbicara dengan aksen Boston, memiliki dendam terhadap ayah tiri Billy, suka menjahit dan mengurus rumah tangga, rambut hitam dan mata cokelat.
 15. Samuel: beraga Yahudi dan satu-satunya yang percaya kepada Tuhan, seorang pemahat kayu, rambut dan janggutnya keriting, mata cokelat.
 16. Mark: pekerja keras, sering disebut *zombie* karena ia tidak melakukan apa pun kecuali disuruh dan akan menatap tembok ketika bosan.

17. Steve: peniru gelagat orang untuk komedi, suka mengejek orang.
18. Lee: seorang pelawak dan sering bertindak nakal.
19. Jason: sering membuat banyak masalah.
20. Bobby: seorang pemimpi dan senang berkhayal, tidak berambisi dan tidak berminat pada intelektual.
21. Shawn: seorang tunarungu, sering dianggap terbelakang, sering mengeluarkan suara dengungan untuk merasakan getaran di kepalanya.
22. Martin: seorang yang sombong dari New York, suka pamer kemewahan serta senang berlagak, ingin memiliki segala hal tanpa bekerja, rambut pirang dan mata kelabu.
23. Timothy: bekerja di sebuah toko bunga sampai dia bertemu dengan seorang pria homo yang menggodanya dan setelah itu dia pergi ke dunianya sendiri.
24. *The Teacher* (Sang Guru): merupakan perpaduan dari ke 23 kepribadian lainnya, sangat peka dan punya selera humor yang bagus, dan dia memiliki semua ingatan tentang semua kejadian yang dialami oleh semua kepribadian Billy.²⁶

4. Anastasia Wella

Seorang wanita asal Indonesia yang lahir sekitar 27 tahun silam ini pada tahun 2009 didiagnosis mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID) atau gangguan identitas disosiatif. Anastasia Wella menjadi pasien pengidap gangguan identitas disosiatif pertama yang diketahui di Indonesia.

²⁶“Billy Milligan”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Billy_Milligan (28 April 2017).

Gangguan yang muncul pada dirinya disebabkan oleh trauma parah yang dialami akibat perlakuan kasar dari orang tuanya. Selain itu, Anastasia Wella atau yang akrab disapa Wella yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara ini sering mengalami tekanan dari lingkungan sekolah. Wella sering dikucilkan, dianggap culun hingga dibuat merasa minder, *di-bully* dan sering merasa sendiri sehingga merasakan takut yang berlebihan. Semua pengalaman buruk yang menimpa Wella terjadi ketika Wella masih berusia sekitar 9 tahun dan kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang. Pengalaman buruk itulah yang memaksakan kepribadian Wella terpecah menjadi 9 kepribadian.

Switching atau penggantian kepribadian pada diri Wella akan terjadi apabila dia menghadapi masalah, merasa terancam atau berada dalam pilihan yang sulit. Jika Wella sudah mulai panik, kepalanya terasa migrain dan muncul rasa cemas, itu merupakan pertanda akan terjadi penggantian kepribadian dalam dirinya.

Wella memiliki 9 kepribadian dengan nama dan karakter yang berbeda. Berikut ini kepribadian-kepribadian dari Wella, yakni:

- a. Anastasia Wella: kepribadian tuan rumah atau kepribadian inti, susah marah, agak penakut, lemah berhitung, hobi membaca, beragama Katolik.
- b. Naura: berkarakter tempramen.
- c. Paula: seorang yang ahli berhitung.
- d. Saraswati: seorang model dan penari.
- e. Atin: seorang anak-anak berumur sekitar 8 atau 10 tahun.
- f. Andreas: seorang laki-laki yang suka melakukan kekerasan.
- g. Ravelin: seorang dengan gaya hidup hedonis.
- h. Ayu: seorang yang pandai menulis sastra.

- i. Bilqis: beragama Islam, seorang yang pandai baca tulis Alquran.²⁷

Wella saat ini masih dalam penanganan psikiater. Dia ditangani sejak Maret 2015 oleh dr. Ni Wayan Ani Purnamawati. Wella masih rutin melakukan konsultasi dan beberapa kali melakukan psikoterapi. Dokter yang menangani Wella pun rutin memberi obat anti depresi agar bisa meminimalisir rasa emosi sehingga penggantian kepribadian (*switching*) bisa ikut terminimalisir.



²⁷Nailul Iffah dari Grid.id, “Kisah Wella, Pasien Kepribadian Ganda Pertama di Indonesia, Punya 9 Kepribadian”, *Tribun Medan*. 25 April 2017. <https://medan.tribunnews.com/amp/201704/25/kisah-wella-pasien-kepribadian-ganda-pertama-di-indonesia-punya-9-kepribadian> (29 April 2017).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. *Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan*

1. *Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam*

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah secara etimologi adalah nama (sebutan) orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan. Dalam definisi lain ia mengemukakan jinayah adalah nama perbuatan yang diharamkan berdasarkan syariat baik perbuatan yang mengenai jiwa orang, harta atau lainnya. Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah yaitu setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah. swt. (*syari'*), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.¹

Sementara pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar *qatl* dari *fi'il madhi qatala* yang berarti membunuh.² Sedangkan secara terminologi, pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.³ Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. swt. karena

¹Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam: Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di NAD* (Cet. I; Jakarta: In Hill, 2009), h. 4-5.

²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

menyebabkan hilangnya nyawa manusia.⁴ Dalam kitab *al-Mughni al-Muhtaj* disebutkan bahwa pembunuhan adalah aktivitas menghilangkan nyawa. Sedangkan dalam kitab *Takmilah Fathi Qadir* disebutkan bahwa pembunuhan adalah pekerjaan seorang hamba Allah yang melenyapkan kehidupan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam adalah perbuatan haram yakni menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *stratbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *stratbaar feit* itu sendiri.⁷ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *stratbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku

⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 108.

⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat*, h. 149.

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50.

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 47.

⁸S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Cet. I; Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), h. 205.

dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁹

Secara etimologi, pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti menghilangkan nyawa; mematikan.¹⁰ Dengan imbuhan *pe-* di depan kata *bunuh*, maka akan menjadi kata *pembunuh* yang berarti orang yang membunuh; alat untuk membunuh. Sedangkan apabila ada imbuhan *-an* di belakang kata *pembunuh*, maka akan menjadi kata *pembunuhan* yang berarti proses, cara, perbuatan membunuh.¹¹

Secara terminologi pembunuhan adalah perkara membunuh atau perbuatan membunuh.¹² Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.¹³ Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan menurut hukum nasional ialah perbuatan

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 49.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 239.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 239.

¹²W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 169.

¹³P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus* (Cet. I; Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 102.

menghilangkan nyawa orang lain yang oleh aturan hukum hal itu jelas dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

1. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni:

a. Pembunuhan sengaja (*amd*)

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.¹⁵ Kesengajaan di sini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan.¹⁶ Sehingga menurut hemat peneliti bahwa pelaku memang sudah memiliki niat dan tujuan dari awal hingga selesainya perbuatan. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, antara lain:

- 1) korban adalah orang yang hidup sebelum pembunuhan dilakukan. Maksudnya sebelum pelaku melakukan pembunuhan, korban masih dalam keadaan hidup,
- 2) perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban, yakni pelaku menggunakan alat yang dipandang lazim untuk membunuh seperti benda-benda tajam, senjata api dan lain sebagainya, dan

¹⁵Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Negara* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 36.

¹⁶Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 426.

- 3) ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Karena tanpa adanya niat dari pelaku, maka pelaku tidak akan melakukan perencanaan dengan menyiapkan alat untuk membunuh serta perbuatan tidak akan selesai bahkan mungkin tidak akan terjadi.

Selain itu, syarat-syarat suatu pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila:

- 1) pembunuh adalah orang yang berakal, balig dan sengaja membunuh,
- 2) korban merupakan manusia yang darahnya dilindungi, dan
- 3) alat yang digunakan membunuh merupakan alat yang pada kebiasaannya dapat mematikan.¹⁷

b. Pembunuhan tidak disengaja (*khata'*)

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan dan menggunakan alat yang dipandang secara lazim tidak mematikan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.¹⁸ Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan tidak disengaja antara lain:

- 1) perbuatan pelaku murni tanpa ada niat dan kesengajaan,
- 2) kematian korban karena kesalahan pelaku, dan

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor. Hasanuddin, dkk, *Fiqih Sunnah*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006), h. 411.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan pelaku dengan kematian korban.

c. Pembunuhan tidak ada unsur membunuh atau pembunuhan semi sengaja (*shibhu al-amdi*)

Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh ialah perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang mati karena perbuatannya.¹⁹ Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.²⁰ Misalnya orang melempar batu ke hutan tiba-tiba orang mati terkena batu tersebut; seorang guru yang memukul muridnya, namun tiba-tiba murid yang dipukul tersebut meninggal. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja antara lain:

- 1) pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian,
- 2) ada maksud penganiayaan atau permusuhan, dan
- 3) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional

Bentuk kesalahan (*schuld*) tindak pidana (delik) pembunuhan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Menurut Teguh Prasetyo, delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas "... dengan sengaja", tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti "... diketahuinya", dan sebagainya.

¹⁹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 115.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

Selanjutnya beliau menerangkan bahwa delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata “... karena kealpaannya”, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah “... karena kesalahannya”.²¹ Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

1) Pembunuhan biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.²² Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa antara lain:

a) Unsur subjektif: perbuatan dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.²³

b) Unsur objektif: perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan matinya orang.

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 60.

²²P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17.

²³P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, h. 30-31.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan dia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.²⁴

2) Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP. Perbedaannya dengan pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 KUHP ialah pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan pemberatan antara lain:

a) unsur subjektif:

- (i) dengan sengaja,
- (ii) dengan maksud, dan

b) unsur objektif:

- (i) menghilangkan nyawa orang lain,
- (ii) diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain
- (iii) untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan,
- (iv) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan,

²⁴P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, h. 31.

- (v) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam dia atau mereka terpergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.²⁵

3) Pembunuhan berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP. Menurut Chidir Ali yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.²⁶ Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana antara lain:

- a) unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, dan
- b) unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.²⁷

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi pelaku tidak membatalkan niatnya, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP.

4) Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur dalam Pasal 344 KUHP. Dalam pasal ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya

²⁵P. A. F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, h. 37.

²⁶Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1985), h. 74.

²⁷P. A. F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, h. 44.

yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344 KUHP karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344 KUHP, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.²⁸

b. Pembunuhan tidak sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Hal ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang di mana inti dari Pasal ini ialah kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd* (rumit), yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara harfiah dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.²⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga

²⁸Satria Baja Hitam, "Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif", *Blog Satria Baja Hitam*. <http://satriabajahitam.blogspot.co.id/2013/04/klasifikasi-delik-pembunuhan-menurut.html?m=1> (17 April 2017).

²⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 217.

perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.³⁰ Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya kendaraan lain yang sedang melintas. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum.³¹

C. *Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*

1. **Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

Dalil hukum yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam terdapat di dalam Alquran di antaranya sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah/2:178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu *qi?a?* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

³⁰Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I, h. 281.

³¹Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I, h. 178.

sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam *qi'a*? itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.³²

b. QS. An-Nisa’/4:92-93.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٣﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٤﴾

Terjemahannya:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, maka Melaknatnya serta Menyediakan azab yang besar baginya”.³³

³²Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung: Penerbit Dipenerog, 2013), h. 27.

³³Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 93.

c. QS. Al-Maidah/5:45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahannya:

“Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qi'a*nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qi'a*?)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang Diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.³⁴

d. QS. Al-Maidah/5:32.

مَن أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Oleh karena itu Kami Tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.³⁵

³⁴Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 115.

³⁵Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 113.

e. QS. Al-Furqan/25:68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang Diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuma yang berat”.³⁶

f. QS. Al-An'an/6:151.

۞ قُلْ تَعَالَوْا أَنَا ذُنُوبٌ مِثْلُكُمْ عَلَيَّ حَرَمٌ مِثْلُكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِمْ شَيْئًا ۖ وَالَّذِينَ إِحْسَنًا وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ

Terjemahannya:

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan yang Diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang Diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia Memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.³⁷

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional

Dalam konteks sumber hukum pidana nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan

³⁶Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 366.

³⁷Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 148.

yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.³⁸

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni mulai dari Pasal 338 yang mengatur tentang jenis pembunuhan biasa sampai Pasal 350 yang mengatur tentang jenis pembunuhan pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya.

Namun dalam hal ini hanya beberapa dari Pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan pokok penelitian ini yakni pada Pasal 338, 339, 340, 344 dan 359 KUHP. Maka peneliti akan membahas Pasal-pasal tersebut satu persatu.

- a. Pasal 338 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.³⁹

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat ditemukan beberapa rumusan kata atau kalimat yang dapat memenuhi unsur-unsur subjektif maupun objektifnya, yakni:

- 1) barang siapa,
- 2) dengan sengaja,
- 3) menghilangkan, dan
- 4) nyawa orang lain.⁴⁰

³⁸Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I, h. 31.

³⁹Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 206.

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 223.

Kalimat “Barang siapa” dan “dengan sengaja” cukup untuk mewakili unsur subjektif yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Sementara kalimat “menghilangkan” dan “nyawa orang lain” cukup untuk mewakili unsur objektif yakni perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan kematian. Sedangkan rumusan kalimat yang dapat menunjukkan sanksi dari perbuatan tersebut yakni “dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Pasal 339 KUHP, ”Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴¹

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat ditemukan beberapa rumusan kata atau kalimat yang dapat memenuhi unsur-unsur subjektif maupun objektifnya, yakni:

- 1) pembunuhan biasa,
- 2) diikuti, disertai, atau didahului,
- 3) tindak pidana,
- 4) dengan maksud untuk,
- 5) menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu,
- 6) atau jika tertangkap tangan,

⁴¹Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi IV, h. 206.

7) melindungi dirinya atau kawan-kawannya, dan

8) atau akan mempertahankan barang yang didapat dengan melawan hak.⁴²

Secara umum Pasal ini tidak berbeda dengan Pasal 338 KUHP. Namun yang menjadi perbedaan ialah dalam Pasal ini terdapat rumusan kalimat yakni “diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Kata “disertai” dimaksudkan disertai kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Sementara kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan.⁴³ Sedangkan rumusan kalimat yang dapat menunjukkan sanksi dari perbuatan tersebut yakni “dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pasal 340 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴⁴

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat ditemukan beberapa rumusan kata atau kalimat yang dapat memenuhi unsur-unsur subjektif maupun objektifnya, yakni:

1) barang siapa,

⁴²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 223.

⁴³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 30.

⁴⁴Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi IV, h. 207.

- 2) dengan sengaja,
- 3) direncanakan terlebih dahulu, dan
- 4) menghilangkan nyawa orang lain.⁴⁵

Kalimat “Barang siapa”, “dengan sengaja” dan “direncanakan lebih dulu” cukup untuk mewakili unsur subjektif yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan lebih dahulu. Sementara kalimat “menghilangkan nyawa orang lain” cukup untuk mewakili unsur objektif yakni perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan kematian. Sedangkan rumusan kalimat yang dapat menunjukkan sanksi dari perbuatan tersebut yakni “dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- d. Pasal 344 KUHP, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁴⁶

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat ditemukan beberapa rumusan kata atau kalimat yang dapat memenuhi unsur-unsur subjektif maupun objektifnya, yakni:

- 1) barang siapa,
- 2) menghilangkan nyawa orang lain,
- 3) atas permintaan orang itu sendiri, dan
- 4) yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh.⁴⁷

⁴⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 223.

⁴⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi IV, h. 209.

⁴⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 224.

Kalimat “Barang siapa”, “atas permintaan orang itu sendiri” dan “yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh” cukup untuk mewakili unsur subjektif yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, meskipun dalam ketentuan Pasal tersebut tidak ada kalimat yang merumuskan suatu kesengajaan atau dengan sengaja, namun perbuatan pelaku yang melaksanakan permintaan korban dianggap sebagai kesengajaan (melaksanakan permintaan korban). Sementara kalimat “menghilangkan nyawa orang lain” cukup untuk mewakili unsur objektif yakni perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan kematian. Sedangkan rumusan kalimat yang dapat menunjukkan sanksi dari perbuatan tersebut yakni “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- e. Pasal 359 KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁴⁸

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat ditemukan beberapa rumusan kata atau kalimat yang dapat memenuhi unsur-unsur subjektif maupun objektifnya, yakni:

- 1) barang siapa,
- 2) karena kesalahan (kealpaannya), dan
- 3) menyebabkan orang lain mati.

Kalimat “Barang siapa” dan “karena kesalahan (kealpaannya)” cukup untuk mewakili unsur subjektif yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Sementara kalimat “menyebabkan orang lain mati” cukup untuk mewakili unsur

⁴⁸Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi IV, h. 217.

objektif yakni perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan kematian. Sedangkan rumusan kalimat yang dapat menunjukkan sanksi dari perbuatan tersebut yakni “dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

D. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam sanksi atau hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan menurut segi tinjauannya. Dalam hal ini ada empat penggolongan.⁴⁹ Namun peneliti hanya akan membahas penggolongan yang berkaitan dengan pokok penelitian yakni penggolongan pertama.

Penggolongan pertama ini didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*‘uqubah asliyah*), seperti hukuman *qi’ā’* untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*‘uqubah badaliyah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qi’ā’*, atau hukuman *ta’zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qi’ā’* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qi’ā’*. Demikian pula hukuman *ta’zir* juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah *ta’zir* sendiri,

⁴⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 260.

tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-jarimah hudud atau *qi?a?-diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.

c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan hukuman *qi?a?* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali.

d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah di lehernya.⁵⁰

Sementara sanksi hukum atas tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu:
 - a) *qi?a?*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya,
 - b) *diyat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang yang senilai harganya. *Diyat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, dan
 - c) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 260-261.

2) Pelaku pembunuhan yang tidak sengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu:

- a) pelaku membayar *diyat*,
- b) membayar *kifarah* (memerdekakan budak mukmin), dan
- c) jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁵¹

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Nasional

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang.⁵² Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok (*hoofdstraffen*) terdiri dari lima jenis pidana, yakni:

1) Pidana mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertengahan yang tinggi antara yang setuju dan tidak setuju.⁵³ Beberapa Negara telah mencabut pidana mati.⁵⁴ Namun terlepas dari semakin banyaknya negara

⁵¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 35.

⁵²Pasal 103 KUHP.

⁵³Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I, h. 195.

⁵⁴Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 179.

yang tidak lagi memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidananya, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih tetap memberlakukan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati.⁵⁵

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.⁵⁶

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁵⁷

Pidana kurungan dapat sebagai pengganti pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayar, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.⁵⁸

4) Pidana denda

⁵⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 120.

⁵⁶P. A. F. Lamintang, *Hukum Panitesir Indonesia* (Bandung: Aremico, 1986), h. 58

⁵⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 183.

⁵⁸Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Pidana dan Pemidanaan*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23-24.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵⁹ Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan seperti pelanggaran atau kejahatan ringan.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. Menurut Andi Hamzah bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.⁶⁰

b. Pidana tambahan (*bijkomende straffen*) terdiri dari tiga jenis pidana, yakni:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.⁶¹

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang

⁵⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I, h. 123.

⁶⁰Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), h. 46.

⁶¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 192.

dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, di mana pidana perampasan menjadi imperatif.⁶²

3) Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jika diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.⁶³

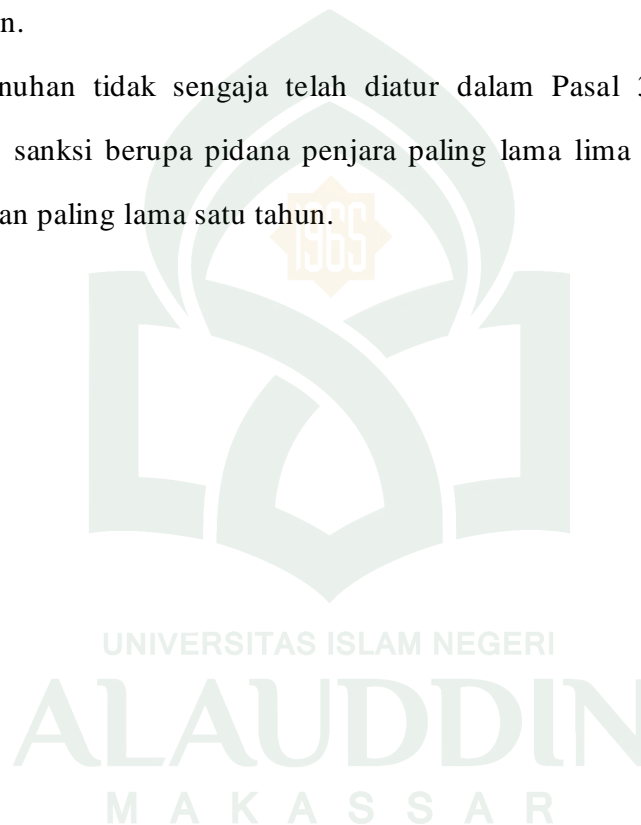
Sementara sanksi hukum atas tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
 - a) untuk tindak pidana pembunuhan biasa telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yakni dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - b) untuk tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 339 KUHP yakni dengan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

⁶²Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I, h. 201

⁶³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 53.

- c) untuk tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yakni dengan sanksi berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
 - d) untuk tindak pidana pembunuhan atas permintaan sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yakni dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Pembunuhan tidak sengaja telah diatur dalam Pasal 359 KUHP yakni dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.



BAB IV

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENDERITA GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF, ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

A. *Pembunuhan Oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif dalam Pandangan Hukum Islam*

1. Penjelasan Umum

Pada dasarnya, Islam telah melarang seseorang melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan haram yang sangat dimurkai oleh Allah. swt. Selain itu, Islam juga sangat menghargai nyawa manusia. Bukan hanya nyawa milik kaum muslim saja, tapi juga nyawa para pemeluk agama lain. Karena syariat Islam ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang di mana kelima hal ini dikenal dengan istilah *dharūriyyātul khams*. Sehingga barang siapa yang melanggar salah satu dari kelima hal tersebut maka harus mendapatkan sanksi atau hukuman berdasarkan syariat Islam yang disesuaikan dengan pelanggaran tersebut.

Dalam hal perbuatan menghilangkan nyawa atau melakukan pembunuhan, Islam telah mengatur sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melanggar. Sanksi bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu; (a) pembunuh itu *dīqīṣāṣ* atau diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh

bagi pembunuhan yang disengaja, dan (b) pembunuh membayar *diyat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja.¹

Namun, dalam pemberian sanksi kepada pelaku pembunuhan, tidak serta merta langsung dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk memberikan hukuman *qisās* kepada pelaku, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.² Namun, dari syarat-syarat tersebut peneliti akan lebih menyoroti syarat yang mengatakan bahwa pelaku harus berakal atau waras.

Dalam Islam, orang yang berakal adalah orang yang mampu mengikat atau mengendalikan hawa nafsunya. Alquran menggunakannya bagi sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Selain itu menurut Al-Jurjani, akal ialah substansi jiwa yang diciptakan Allah. swt., yang berhubungan dengan badan manusia, akal juga berarti cahaya (*nur*) dalam hati untuk mengetahui kebenaran dan kebaikan.³ Sedangkan orang gila menurut Islam ialah bukan orang yang hilang akalnya, tetapi orang yang akalnya tidak mampu menerangi kegelapannya atau tertutupnya dari cahaya Ilahi. Dengan demikian gila adalah setiap orang yang cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga akalnya tertutup dan tidak berfungsi.⁴

Adapun beberapa bentuk yang termasuk dalam pengertian gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis antara lain:

¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11.

²Lihat h. 4.

³Dunia Baca, "Pengertian Akal Menurut Alquran", *Situs Resmi Dunia Baca*. <http://duniabaca.com/pengertian-akal-menurut-al-quran.html> (1 Mei 2017).

⁴Kompasiana, "Siapa Sesungguhnya Orang Gila Itu?", *Situs Resmi Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/amp/ilammaolani/siapa-sesungguhnya-orang-gila-itu> (2 Mei 2017).

a. Gila terus-menerus

Gila terus-menerus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan *fuqaha* gila semacam ini disebut dengan *al-junūn al-mutbaq*.⁵

b. Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali dan apabila keadaan tersebut berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus-menerus hilang sama sekali, sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.⁶

c. Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi di mana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.⁷

d. Dungu

Para *fuqaha* sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang dungu sebagai berikut:

⁵Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.), h. 566.

⁶Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, h. 567.

⁷Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, h. 567.

Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.⁸

Jika dikaitkan antara keadaan tersebut di atas dengan penderita gangguan identitas disosiatif, maka menurut peneliti bahwa gangguan identitas disosiatif ini bisa dikategorikan sebagai gila sebagian dalam pandangan Islam. Dengan alasan bahwa pada dasarnya penderita gangguan identitas disosiatif dalam melakukan segala kegiatannya itu dilakukan dengan sadar (oleh kepribadian yang sedang memegang kendali atas tubuh penderita). Setiap kepribadian yang ada sadar dan ingat akan segala kegiatan yang telah dilakukan. Karena setiap kepribadian memiliki ingatannya masing-masing dan setiap kepribadian saling tidak tahu-menahu atau pun tidak mengingat akan kegiatan yang dilakukan oleh kepribadian lainnya. Sehingga secara fisik penderita gangguan identitas disosiatif bisa dikatakan waras, karena tetap memiliki kesadaran akan segala perbuatannya. Namun, secara mental penderita gangguan identitas disosiatif memang dikategorikan memiliki gangguan kejiwaan, karena penderita mengalami gangguan psikologis yang melibatkan kehilangan memori atau perubahan identitas secara mendadak. Dalam kondisi stres yang amat berat atau keterkejutan, kesadaran individu menjadi terdisosiasi (terpisah atau terpecah) dari pengalaman-pengalaman dan ingatan sebelumnya.⁹

Apabila kedua hal di atas kita kaitkan menjadi tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam pandangan hukum Islam, maka bisa disamakan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Dalam hukum Islam pembunuhan oleh orang dengan gangguan kejiwaan

⁸Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, h. 568.

⁹Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, terj. Brian Marwensdy, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*, Jilid II (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 325.

tidak wajib dikenakan hukuman *qisās*, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Namun, bukan berarti pelaku terbebas dari hukuman atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku akan tetap dikenakan sanksi namun tidak juga diwajibkan *qisās*.

2. Penjatuhan Sanksi

Dalam hukum Islam, terdapat pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Menurut Ahmad Hanafi, pertanggungjawaban pidana dalam Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 dasar, yaitu:

- a. adanya perbuatan yang dilarang;
- b. perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
- c. pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.¹¹

Apabila ketiga hal di atas terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana itu ada pada pelaku. Namun, apabila ada satu hal dari ketiga hal tersebut yang tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika kita kaitkan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif, dengan keadaan pelaku yang merupakan seorang *mukallaf*, pelaku tahu dan sadar akan perbuatannya, serta pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan murni

¹⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 154.

¹¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 154.

sengaja, maka peneliti berpendapat bahwa ada pertanggungjawaban pidana atas pelaku. Dengan alasan bahwa 3 hal dasar untuk penegakan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Jika kita tinjau kembali, pelaku yang merupakan seorang penderita gangguan identitas disosiatif, tahu dan sadar bahwa perbuatannya (pembunuhan) tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan pelaku sendiri, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan dari kepribadian yang sedang memegang kendali pada saat dilakukannya perbuatan tersebut. Di samping itu, pelaku yang notabene adalah seorang *mukallaf*, maka telah dianggap tahu atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Jika pelaku telah ditetapkan bahwa ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka selanjutnya adalah pemberian hukuman atau penjatuhan sanksi. Pada pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif ini sama dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan, maka pelaku tidak wajib dikenakan *qisās*. Namun, bukan berarti pelaku juga terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka terlepas dari pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan, penjatuhan hukuman atau sanksi tetap diserahkan kepada keluarga korban untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini mempunyai relevansi yang kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga. Betapa penderitaan pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang.¹²

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I, h. 35.

Namun, pihak berwenang atau pun orang-orang yang tahu akan keadaan pelaku juga wajib menjelaskan kepada keluarga korban mengenai keadaan pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan. Karena sebagai pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan, pelaku bisa saja tidak dikenakan hukuman *qisās*, jika keluarga memilih hukuman *qisās* untuk pelaku. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis:

Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda dimaafkan kesalahan dari tiga hal dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia dewasa, dari orang gila hingga ia waras.

Selain itu, jika soal sanksi apa yang tepat dijatuhkan terhadap pelaku, maka menurut penulis pribadi ialah hukuman *diyat* yang merupakan hukuman pengganti dari *qisās*. Namun, hukuman ini hanya akan berlaku apabila ada pengampunan dari keluarga korban, maka hukuman *qisās* menjadi gugur dan diganti dengan hukuman *diyat*.¹³ Menurut H. Sulaiman Rasyid, *diyat* ada 2 macam, yakni:

- a. *Diyat* berat, yaitu 100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina dengan umur 4 tahun masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Diwajibkan *diyat* berat karena:
 - 1) sebagai ganti hukuman bunuh (*qisās*) yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul sengaja. *Diyat* ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri.
 - 2) melakukan pembunuhan seperti sengaja. *Diyat* ini wajib dibayarkan oleh keluarganya, diangsur dalam waktu 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.
- b. *Diyat* ringan, banyaknya 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5 dengan perincian: 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2

¹³Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 231.

tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta umur 3 tahun masuk 4 tahun dan 20 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dengan masa 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya.

Jika *diyat* tidak dapat dibayarkan dengan unta wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham (sekitar 37,44 kg perak). Kalau *diyat* berat, maka ditambah sepertiganya. Selain itu, *diyat* perempuan (jika yang terbunuh perempuan) adalah seperdua dari denda laki-laki. *Diyat* orang yang beragama Yahudi atau Nasrani adalah sepertiga dari *diyat* orang Islam.¹⁴

Jadi, kesimpulannya ialah pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan saksinya, hal itu merupakan hak otonomi sepenuhnya bagi keluarga korban untuk menentukan salah satu dari beberapa alternatif pilihan sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

B. Pembunuhan Oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif dalam Pandangan Hukum Nasional

1. Penjelasan Umum

Tindak pidana pembunuhan merupakan jenis kejahatan (*rechtdelict*) atau delik hukum, yang mana pelaku telah melakukan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan.¹⁵ Di mana pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain pelaku secara tidak adil merampas

¹⁴H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 432-434.

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi I (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 58.

hak hidup orang lain. Selain itu, tindak pidana pembunuhan juga dikategorikan sebagai delik material (materiil) yaitu delik yang dianggap selesai apabila akibat dari perbuatan sudah terjadi atau dengan kata lain delik ini menitik beratkan pada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut. Di samping itu, tindak pidana pembunuhan juga termasuk delik *dolus* (kesengajaan) yakni suatu delik yang memuat unsur kesengajaan, dalam hal ini pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam hukum pidana nasional Indonesia dikenal istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum nasional adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Selanjutnya Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada titik pidana kepada pembuatnya.¹⁶ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya perbuatan adalah asas kesalahan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹⁸ Lebih lanjut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan pidanya terdakwa (dipertanggungjawabkan) maka terdakwa harus:

¹⁶Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 234.

¹⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 156.

¹⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Cet. III; Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.75.

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggungjawab;
- c. dengan sengaja atau alpa; dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Jika hal di atas kita kaitkan dengan tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif menurut hukum nasional, maka sebelumnya perlu kita tinjau dulu bagaimana kemampuan bertanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana seorang pelaku dengan gangguan identitas disosiatif yang melakukan tindak pidana.

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari tindak pidana tanpa adanya alasan pemaaf. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.¹⁹ Di sini sudah sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang menderita gangguan identitas disosiatif ialah melakukan perbuatan pidana berupa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, yang merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat dengan dasar hukum Pasal 338 KUHP. Dengan demikian syarat pertama untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang

¹⁹Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I, h. 171.

buruk,²⁰ atau dengan kata lain , mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.²¹ Pada intinya, akal dan kehendak menjadi faktor penentu utama kondisi batin seseorang, sehat atau tidak. Jika kita kaitkan dengan pelaku yang menderita gangguan identitas disosiatif, pada dasarnya penderita memiliki akal yang normal dan mampu berkehendak, dalam hal ini ia tahu dan sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga pelaku dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Selain itu, mengenai dilakukan dengan sengaja atau alpa, maka pelaku sudah jelas melakukan perbuatannya dengan sengaja. Terbukti dengan selesainya perbuatan yang dilakukan pelaku. Dan untuk tidak ada alasan pemaaf, tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku. Sehingga syarat ketiga dan keempat untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi. Maka secara garis besar, pelaku yang menderita gangguan identitas disosiatif dianggap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif yang dikenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak berlaku baginya alasan pemaaf. Jika pelaku telah ditetapkan bahwa ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka selanjutnya adalah penjatuhan sanksi.

²⁰M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), h. 129.

²¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, h. 80.

Mengenai sanksi, sesuai dengan pemaparan di bab sebelumnya, bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku dapat disesuaikan dengan jenis pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini pelaku melakukan jenis pembunuhan sengaja dengan dasar hukum Pasal 338 KUHP dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun, menurut peneliti secara pribadi memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Dalam hal ini menurut peneliti, ada 2 keadaan penting yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. jika perbuatan pidana tersebut (pembunuhan) dilakukan oleh kepribadian pengganti (*alter*) dari penderita gangguan identitas disosiatif, maka pelaku tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan alasan yang menjadi subjek atau pelaku utama dari perbuatan tersebut ialah kepribadian pengganti yang notabene merupakan bagian dari gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan yang diderita oleh pelaku;
- b. jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh kepribadian tuan rumah atau kepribadian asli, maka pelaku dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan alasan yang menjadi subjek atau pelaku utama dari perbuatan tersebut ialah kepribadian asli yang notabene bukan merupakan bagian dari gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan yang diderita oleh pelaku. Dalam artian, pelaku utama merupakan kepribadian asli yang dibawa sejak lahir dan bukan merupakan kepribadian yang terbentuk akibat dari gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan yang dialaminya. Karena pelaku dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka ada sanksi yang harus diterima oleh pelaku. Sanksi-sanksi tersebut bermacam-macam sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.

Namun, pada intinya untuk membuktikan 2 keadaan tersebut di atas, dalam proses penyidikan, penyidik membutuhkan bantuan dari psikolog atau psikiater. Pendapat penulis di atas diperkuat dengan adanya pendapat dari seorang dokter spesialis kejiwaan. Menurut dr. Venny Pungus, Sp.KJ. penderita gangguan identitas disosiatif dapat dipidana. Karena penderita gangguan identitas disosiatif bukan merupakan gangguan mental yang berat. Sehingga dia masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²²

Namun, terlepas dari pendapat peneliti di atas, yang perlu dijadikan simpulan ialah pendapat yang memiliki dasar hukum, yakni pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum nasional dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan alasan penderita dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atau perbuatannya. Sanksi yang dikenakan, disesuaikan dengan jenis pembunuhan yang dilakukan yakni jenis pembunuhan sengaja dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan pasal 338 KUHP. Pada intinya, dijatuhkannya sanksi atau tidak terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif sepenuhnya merupakan keputusan hakim. Penulis hanya memaparkan beberapa teori-teori yang dianggap relevan dengan pokok persoalan tersebut.

²²Vinni Maranatha Manurung, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan yang Menderita *Dissosiative Identity Disorder (DID)*", *Jurnal Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, 2014), h. 9.

C. Analisis Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Pandangan Terhadap Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif

Dalam hukum Islam, penderita gangguan identitas disosiatif dikategorikan sebagai gila sebagian, di mana penderita tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Untuk pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum Islam, dianggap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan alasan bahwa 3 hal dasar untuk penegakan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi yakni adanya perbuatan yang dilarang; perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Sedangkan dalam hukum nasional, penderita gangguan identitas disosiatif dipandang sebagai suatu gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan, bukan suatu penyakit kejiwaan seperti yang terdapat dalam pasal 44 KUHP. Perlu diketahui bahwa dalam kamus bahasa Indonesia, gangguan berarti hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau tidaknormalan (tentang jiwa, kesehatan, pikiran),²³ sementara penyakit berarti gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem (pada makhluk hidup).²⁴ Selain itu, penyakit merupakan suatu hal yang dapat disembuhkan sedangkan gangguan merupakan hal yang terus ada, tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat diminimalisir. Untuk pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dalam hukum nasional dianggap dapat

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 434.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1.246.

dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan alasan bahwa 4 hal dasar untuk penegakan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi yakni melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggungjawab; dengan sengaja atau alpa; dan tidak ada alasan pemaaf.

2. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku

Dalam hukum Islam, pembunuhan oleh penderit gangguan identitas disosiatif tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, hal itu merupakan hak otonomi sepenuhnya bagi keluarga korban untuk menentukan salah satu dari beberapa alternatif pilihan sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun, secara pribadi penulis berpendapat bahwa pelaku tidak wajib dikenakan hukuman *qisās* dikarenakan pelaku merupakan seorang yang memiliki gangguan kejiwaan, sehingga hukuman yang pantas dikenakan ialah hukuman *diyat* berat.

Sedangkan dalam hukum nasional, pembunuhan oleh penderit gangguan identitas disosiatif tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, pelaku dikenai pasal sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, dalam hal ini pelaku melakukan jenis pembunuhan sengaja dengan dasar hukum Pasal 338 KUHP dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Perbandingan Hukum

Jika berbicara mengenai perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum nasional, mana yang lebih baik dan efisien untuk ditegakkan dalam perkara ini, akan lumayan sulit ditentukan. Pada dasarnya kedua hukum tersebut memiliki beberapa kesamaan. Kedua hukum tersebut menganggap bahwa gangguan identitas disosiatif

merupakan suatu gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Selain itu, kedua hukum tersebut juga sama-sama mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif.

Namun, menurut penulis pribadi berpendapat bahwa hukum Islam lebih rinci dan efisien dibanding hukum nasional. Salah satunya terbukti dengan adanya pembagian beberapa jenis gila dalam Islam. Sehingga gila tidak hanya disatu jeniskan atau disamaratakan tingkat kegilaannya. Selain itu, dengan adanya pembagian tersebut penulis dapat terbantu dalam menentukan termasuk ke dalam jenis gila apakah gangguan identitas disosiatif itu. Sehingga penulis juga dapat menentukan apakah pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sedangkan dalam hukum nasional, penulis tidak menemukan jenis-jenis gila atau gangguan kejiwaan dalam hukum nasional. Penulis tidak menemukan gangguan jiwa apa saja yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sehingga penulis sedikit kesulitan dalam menentukan apakah pelaku penderita gangguan identitas disosiatif dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Di samping itu, dalam sistem penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hukum Islam menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada keluarga korban untuk menentukan hukuman apa yang ingin diberikan kepada pelaku dari beberapa alternatif pilihan hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini memiliki relevansi yang kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga korban. Sementara hukum nasional, mengenai penjatuhan hukuman hal itu sepenuhnya menjadi otoritas hakim untuk menentukan hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya, gangguan identitas disosiatif merupakan suatu gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan yang sebagian besar diakibatkan oleh trauma parah pada masa kanak-kanak yang terjadi secara berulang.
2. Gangguan identitas disosiatif dalam Islam merupakan sakit mental yang bersifat duniawi yang disebabkan oleh konflik bawah sadar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak awal dan pemakaian mekanisme pertahanan yang ditimbulkan oleh impuls dan emosi yang depresi.

Sedangkan gangguan identitas disosiatif dalam psikologi nasional merupakan suatu gangguan disosiatif yang paling dramatis namun paling jarang ditemukan, di mana individu yang menderita gangguan ini memiliki dua kepribadian atau lebih di dalam tubuhnya. Gangguan ini disebabkan oleh; trauma parah yang dialami pada masa kanak-kanak awal yang terjadi secara berulang, kurang atau bahkan tidak adanya orang yang mau melindungi atau pun menghibur individu dari pengalaman buruk yang dialami, gangguan identitas disosiatif ini berkembang akibat pengaruh dari anggota keluarga lain yang memiliki gangguan psikologis. Selain itu, penderita gangguan identitas disosiatif memiliki ciri-ciri, yakni; memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda, kepribadian-kepribadian tersebut mengambil alih perilaku penderita secara bergantian, mengalami amnesia

dalam artian tidak mengingat apa yang telah dilakukan, dan gangguan tersebut bukan disebabkan oleh efek psikologi langsung dari suatu zat.

3. Dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, hal itu merupakan hak otonomi sepenuhnya bagi keluarga korban untuk menentukan salah satu dari beberapa alternatif pilihan sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sedangkan dalam hukum nasional, pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif dikenai pertanggungjawaban pidana dan mengenai penjatuhan sanksinya, pelaku dikenai pasal sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, dalam hal ini pelaku melakukan jenis pembunuhan sengaja dengan dasar hukum Pasal 338 KUHP dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya perhatian lebih terhadap penderita gangguan identitas disosiatif, mengingat penyebab dari gangguan ini ialah kurangnya perhatian terhadap penderita, 2) hukum pidana nasional perlu membuat aturan yang lebih spesifik mengenai gangguan kejiwaan apa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, 3) hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk memutuskan perkara yang sama dengan pokok penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibnu. Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ‘ala Ad-Dur Al-Mukhtar). Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003.
- “Billy Milligan”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Billy_Milligan (28 April 2017).
- “Gangguan Identitas Disosiatif”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_identitas_disosiatif (20 April 2017).
- Ahmad, Abd. Kadir. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data” Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, Makassar.
- Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico, 1985.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ariwibowo, Adityo. “Sistem Hukum Nasional Indonesia (Sudah adakah Sistem Hukum Nasional Indonesia?)”, *Blog Adityo Ariwibowo*. <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/06/11/sistem-hukum-nasional-indonesia-sudah-adakah-sistem-hukum-nasional-indonesia/> (2 November 2016).
- Atkinson, Rita L. dkk. *Introduction to Psychology*, terj. Widjaja Kusuma, *Pengantar Psikologi*. Batam: Interaksara, t.th.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy*. Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.
- Baca, Dunia. “Pengertian Akal Menurut Alquran”, *Situs Resmi Dunia Baca*. <http://duniabaca.com/pengertian-akal-menurut-al-quran.html> (1 Mei 2017).
- Bakker, Anton. *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Cet. X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Fadhilza. “Kepribadian Ganda Penyakit Akibat Gangguan Jin”, *Blog Fadhilza*. <http://www.fadhilza.com/2015/08/dunia-metafisika/kepribadian-ganda-penyakit-akibat-gangguan-jin.html> (22 April 2017).

- Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Friedman, Howard S. dan Miriam W. Schustack, *Personality: Classic Theories and Modern Research*, terj. Benedictine Widyasinta, *Kepribadian: Teori Klasik dan Riset Modern*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Hamzah, Andi. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hitam, Satria Baja. "Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif", *Blog Satria Baja Hitam*. <http://satriabajahitam.blogspot.co.id/2013/04/klasifikasi-delik-pembunuhan-menurut.html?m=1> (17 April 2017).
- Iffah Nailul dari Grid.id, "Kisah Wella, Pasien Kepribadian Ganda Pertama di Indonesia, Punya 9 Kepribadian", *Tribun Medan*. 25 April 2017. <https://medan.tribunnews.com/amp/201704/25/kisah-wella-pasien-kepribadian-ganda-pertama-di-indonesia-punya-9-kepribadian> (29 April 2017).
- Indonesia, Kitab Salaf. "Pembunuhan Menurut Hukum Islam", *Blog Kitab Salaf Indonesia*. https://kitabsalafindonesia.wordpress.com/2013/09/19/pembunuhan-menurut-hukum-islam/_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2432303787 (10 Oktober 2016).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kholiq, M. Abdul. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- King, Laura A. *The Science of Psychology: An Appreciative View*, terj. Brian Marwensdy, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Kompasiana, "Siapa Sesungguhnya Orang Gila Itu?", *Situs Resmi Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/amp/ilammaolani/siapa-sesungguhnya-orang-gila-itu> (2 Mei 2017).
- Kompasiana. "Kepribadian Ganda: Satu Orang, Tapi Kok Beda, Ya?", *Situs Resmi Kompasiana*. <http://m.kompasiana.com/naftalia/kepribadian-ganda-satu-orang-tapi-kok-beda-ya> (20 April 2017).

- Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus*. Cet. I; Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P. A. F. *Hukum Panitesir Indonesia*. Bandung: Aremico, 1986.
- Mahmud, Muhammad Mahmud. *‘Ilm al-Nafs al-Ma’āşir fī Ḍaw’i al-Islām*. Jeddah: Dār al-Syurūq, 1984.
- Maman. *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manurung, Vinni Maranatha. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan yang Menderita *Dissosiative Identity Disorder* (DID)", *Jurnal Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, 2014.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam: Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di NAD*. Cet. I; Jakarta: In Hill, 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Medis, ID. "Makalah Gangguan Disosiatif: Gangguan Identitas, Amnesia, Psikogenetik dan Fugue", *Situs Resmi ID Medis*. <http://www.idmedis.com/2015/11/makalah-gangguan-disosiatif-gangguan-identitas.html> (10 Oktober 2016).
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.
- Notopuro, Hardjito. "Tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional" dalam Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan RI*. Jakarta: Cendana Press, 1984.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. XLVIII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor. Hasanuddin, dkk, *Fiqh Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Jakarta; Rajawali Pers, 2008.

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet. III; Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (16): Jinayat*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sarwono, Sarlito W. *Pengantar Psikologi Umum*. Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. I; Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. XII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Space, Bzee's Inner. "The Three Faces of Eve", *Blog Bzee's Inner Space*. <https://bzeel2space.wordpress.com/2011/09/08/the-three-faces-of-eve/amp/#amph=1> (28 April 2017).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: ALfabeta, 2006.
- Suparni, Ninik. *Eksistensi Pidana Denda dalam Pidana dan Pemidanaan*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. Cet. X; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Susanto, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Negara*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Tomb, David A. *House Officer Series Psychiatry*, terj. Martina Wiwie S. Nasrun, dkk., *Buku Saku Psikiatri*. Cet. I; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004.
- W., Santrock, J. *Child Development*. New York: McGraw-Hill, 2007.
- Warman, D. Aditia. "Pengantar Hukum Indonesia", *Blog D. Aditia Warman*. <http://pandangandaditiawarmansh.blogspot.co.id/2013/05/pengantar-hukum-indonesia.html?m=1> (2 November 2016).

RIWAYAT HIDUP

NUR NAAFILAH NURDIN, lahir pada hari Selasa tanggal 21 Maret 1995 di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan Nurdin H, B.Sc. dan Syamsudduha Khalik, S.Pd. Memiliki seorang saudara laki-laki bernama Syamriwal Nurdin.



Mulai menempuh pendidikan formal di TK Al-Abrar Makassar dan tamat tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Inpres Puri Taman Sari Makassar dan tamat pada tahun 2007, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Rappang dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Rappang dan selesai pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum dan menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada tahun 2017.